

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat membawa dunia memasuki era baru menuntut informasi yang lebih cepat. Banyak perubahan yang terjadi pada lingkungan bisnis maupun pemerintahan seperti perubahan teknologi produksi, teknologi informasi dan struktur organisasi, yang mendorong organisasi untuk terus berupaya meningkatkan kinerja organisasi dalam mencapai tujuannya. Bagi dunia kerja penggunaan teknologi informasi bukanlah suatu hal yang baru, apalagi pada zaman modernisasi seperti sekarang ini. Melalui penggunaan teknologi informasi tidak hanya mengubah bagaimana kita bekerja, tetapi juga mengubah apa yang kita kerjakan. Terlebih dengan didukungnya sarana komputer, yang sering digunakan dalam menyelesaikan tugasnya atau suatu pekerjaan. Komputer adalah suatu alat pengolah data yang dapat melaksanakan perhitungan secara substansial, termasuk operasi hitung-menghitung, dan operasi logika, tanpa campur tangan manusia (Widjajanto, 2001).

Sistem informasi akuntansi adalah sekumpulan perangkat sistem yang berfungsi untuk mencatat data transaksi, mengolah data, dan menyajikan informasi akuntansi kepada pihak internal (manajemen perusahaan) dan pihak eksternal (pembeli, pemasok, pemerintah, kreditur, dan sebagainya (Winarno, 2006). Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan subsistem dari sistem publik

informasi manajemen yang mengelola data keuangan untuk memenuhi kebutuhan pemakai intern dan ekstern (Ane dan Anggraini, 2012). Sistem informasi akuntansi membantu dalam membuat laporan eksternal, mendukung aktivitas rutin, mendukung pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian serta penerapan pengendalian internal (Jones, 2008 dalam Prabowo, Mahmud, dan Murtini, 2014). Sering kali pegawai dalam input data transaksi – transaksi dapat dimungkinkan adanya kekeliruan, maka input data (*entry data*) diperlukan suatu pengawasan dan pengendalian. Sehingga dapat memberikan informasi yang benar-benar bisa digunakan oleh pihak yang berkepentingan.

Pemerintah daerah harus menyajikan informasi keuangan yang akurat sehingga pemerintah daerah harus memiliki sistem informasi yang terpercaya. Sistem informasi tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, maka dibutuhkan rancangan implementasi sistem (Aji, 2015). Estiaji (2014) dalam Aji (2015) menyatakan pemerintah daerah saat ini sedang mengimplementasi rancangan sistem keuangan daerah.

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah harus disajikan secara relevan dan reliable. Untuk menghasilkan laporan yang baik maka pemerintah daerah perlu memiliki sistem akuntansi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Negara serta Permendagri Nomor. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah yang disempurnakan dengan Permendagri No.59 Tahun 2007 yaitu menggunakan basis kas modifikasian menuju

akrual (*cash towards accrual*) informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna (Ane dan Anggraini, 2012). Kemudian Permendagri No. 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diterbitkan karena adanya pengalihan dana Bantuan Operasional Sekolah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, penetapan peraturan perundang-undangan mengenai pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berimplikasi terhadap perubahan struktur pendapatan, penegasan terhadap kedudukan pejabat pembuat komitmen, penganggaran tahun jamak dan pengaturan pendanaan tanggap darurat bencana.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi semua kelompok pengguna. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Pada sistem akuntansi di pemerintah daerah, ketentuan umum prosedur akuntansi pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) meliputi serangkaian proses mulai pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tentunya membutuhkan pengendalian dan pengawasan keuangan daerah. Untuk dapat mengendalikan dan mengawasi keuangan daerah pemerintah membutuhkan

sistem informasi akuntansi yang dapat menyajikan informasi data yang akurat dan tepat kepada pemakai yang berkepentingan.

Permasalahan yang sering muncul dalam sistem informasi akuntansi yang berkaitan tentang pengelolaan keuangan daerah yaitu, kurangnya pemahaman satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tentang aset yang dimiliki sehingga dalam proses input tidak tepat, masih sering berubahnya regulasi mengenai sistem pengelolaan keuangan daerah, adanya perbedaan ketentuan peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah, jangka waktu penyerahan laporan pertanggungjawaban terlalu mendadak (Kusumawardani, 2000 dalam Prabowo, dkk 2014). Hal tersebut menyebabkan pengembangan atau penyesuaian sistem harus dilakukan secara berkala dan memerlukan persiapan. Pelatihan kepada pemakai sistem juga harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahan pada saat input data kedalam sistem.

Sistem informasi pemerintah ini mempunyai peran yang penting untuk mensukseskan pembangunan di suatu daerah. Sistem informasi yang baik, bisa menciptakan kesatuan gerak dan langkah antar lembaga/dinas untuk mencapai tujuan. Jika sistem informasi antar lembaga/dinas tidak berjalan baik, maka dimungkinkan terjadinya tumpang tindih kegiatan, bahkan bisa terjadi kegiatan yang saling bertentangan. Sistem informasi yang baik memungkinkan program-program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah bisa direspon oleh masyarakat sehingga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat (Arifin, 2009 dalam Ane dan Anggraini, 2012). Mengingat saat ini hampir di setiap sektor ekonomi diperlukan pegawai, maka sistem informasi akuntansi harus dirancang sedemikian rupa agar

dapat dipahami oleh semua pihak khususnya pihak-pihak yang cenderung memilih sistem informasi akuntansi sebagai jenjang karirnya nanti (Sahusilawane, 2014).

Baik buruknya kinerja dari sebuah sistem informasi akuntansi dapat dilihat melalui kepuasan pemakai sistem informasi akuntansi dan pemakai sistem informasi akuntansi itu sendiri (Supada, 2007 dalam Ane dan Anggraini, 2012). Kinerja sistem informasi akuntansi adalah tingkat kemampuan sistem sesuai dengan fungsinya dalam menghasilkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu yang dapat terlihat melalui kepuasan pemakai sistem informasi akuntansi dan pemakai sistem informasi akuntansi itu sendiri (Ane dan Anggraini, 2012). Komara (2006) menyimpulkan bahwa pengguna sistem (*system use*) dan kepuasan pengguna informasi (*user information satisfaction/UIS*) adalah tolak ukur keberhasilan sistem informasi akuntansi. Kedua konstruk tersebut (pengguna sistem dan kepuasan pengguna) telah digunakan dalam riset sistem informasi sebagai pengganti (*surrogate*) untuk mengukur kinerja (*performance*) SIA (Montazemi, 1988; Choe, 1996; Soegiharto, 2001 dalam Komara, 2006). Tujuan dari pengukuran kinerja dimaksudkan sebagai saran penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja sistem informasi akuntansi pada instansi pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi, peningkatan pelayanan, dan untuk memperbaiki pengambilan

keputusan internal, serta alokasi sumber daya (Latifah dan Sabeni, 2007 dalam Wahyuni, 2008 dalam Ane dan Anggraini, 2012).

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja sistem informasi akuntansi (SIA). Penelitian ini mengacu pada penelitian Prabowo, dkk (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Prabowo, dkk (2014) adalah pada sampelnya dan satu penambahan variabel formalisasi pengembangan sistem. Pada penelitian sebelumnya dilakukan di lingkungan pemerintah kabupaten Temanggung, sedangkan pada penelitian ini dilakukan di pemerintah daerah kota Madiun. Penambahan variabel formalisasi pengembangan karena dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan Komara (2006), Ronaldi (2012), Antari, Diatmika, dan Adiputra (2015), menunjukkan bahwa formalisasi pengembangan sistem berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi.

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengambil judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Madiun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah terdapat pengaruh yang positif signifikan antara keterlibatan pemakai dalam pengembangan SIA terhadap kinerja sistem informasi akuntansi ?

2. Apakah terdapat pengaruh yang positif signifikan antara kemampuan teknik personal terhadap kinerja sistem informasi akuntansi ?
3. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan antara dukungan pimpinan bagian terhadap kinerja sistem informasi akuntansi ?
4. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan antara program pelatihan dan pendidikan pemakai terhadap kinerja sistem informasi akuntansi ?
5. Apakah terdapat pengaruh positif signifikan antara formalisasi pengembangan sistem terhadap kinerja sistem informasi akuntansi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa :

1. Keterlibatan pemakai dalam pengembangan SIA memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi
2. Kemampuan teknik personal berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi
3. Dukungan pimpinan bagian berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi
4. Program pelatihan dan pendidikan pemakai berpengaruh positif terhadap kinerja sistem informasi akuntansi
5. Formalisasi pengembangan sistem berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat:

- a. Untuk membantu manajemen/pemimpin dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hal perbaikan sistem akuntansi.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat akan pelaksanaan manajemen keuangan daerah kota Madiun.
- c. Untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Dalam penulisan skripsi yang dibuat, tersusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang telaah teori dan pengembangan hipotesis, serta kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi operasional variabel; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; teknik analisis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.